

PENCEGAHAN STUNTING MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA LALAPIN KABUPATEN KOTABARU

Saifuddin¹, Gazali Rahman², Sitha Elvia Agustina^{3*}

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat. Indonesia

*Korespondensi: saifuddin.fisip@ulm.ac.id

Citation (APA):

Saifudin, S., Rahman, G., & Agustina, S. E. (2023). Pencegahan Stunting Melalui Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 255–264. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.3109>

Email Authors:

saifuddin.fisip@ulm.ac.id
gazali.rahman@ulm.ac.id
sithaelvia@gmail.com

Submitted: 20 Desember 2023

Accepted: 25 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

Copyright (c) 2023 Saifudin Saifudin, Gazali Rahman, Sitha Elvia Agustina

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Tujuan artikel ini menganalisis pencegahan stunting melalui implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Kotabaru dengan mengambil sampel lokasi penelitian di Desa Lalapin. Hasil penelitian menunjukkan indikator pelaksanaan pencegahan stunting sudah sesuai dalam rangka implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Beberapa indikator utama seperti kesesuaian implementasi kebijakan publik, kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pelibatan sumber daya, kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, serta kepatuhan dan daya tangkap masyarakat dilaksanakan dalam rangka mencegah stunting. Berdasarkan hasil penelitian, pencegahan stunting melalui implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga telah memberikan pengaruh positif di Desa tersebut. Strategi aktor memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan tentang dampak buruk stunting dan cara pencegahannya yang tepat. Meskipun demikian dalam penerapannya masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan seperti kepatuhan dan pemahaman masyarakat desa belum sepenuhnya terjadi karena tidak mematuhi jadwal posyandu secara rutin. Secara umum, pencegahan Stunting melalui Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru telah dilaksanakan dengan baik.

Kata kunci: Pencegahan; Stunting; Program; Implementasi; Kebijakan; Kesehatan

ABSTRACT

This article aims to analyze stunting prevention through the implementation of the Family Empowerment and Welfare Program in Kotabaru Regency by taking a sample of research locations in Lalapin Village. The research results show that the indicators for implementing stunting prevention are appropriate in the context of implementing the Family Empowerment and Welfare Program. Several main indicators such as suitability of public policy implementation, interests of target groups, types of benefits, degree of change, location of decision making, program implementation, involvement of resources, power, interests, strategies of actors involved, as well as community compliance and understanding are implemented to prevent stunting. Based on research results, preventing stunting through the implementation of the Family Empowerment and Welfare Program has had a positive influence on the village. The actor's strategy is to provide outreach, counseling, and training about the bad impacts of stunting and appropriate ways to prevent it. However, in its implementation, several obstacles and problems were still found, such as village community compliance and understanding not yet fully occurring because they did not comply with the routine posyandu schedule. In general, prevention of stunting through the Family Empowerment and Welfare Program in Lalapin Village, Kotabaru Regency has been implemented well.

Keywords: Prevention; Stunting; Programs; Implementation; Policy; Health

PENDAHULUAN

Kelompok masyarakat yang integral disebut dengan keluarga sebagai penopang interaksi serta komunikasi dalam ruang terkecil untuk menciptakan *social role* (peran sosial). Peran sosial ini akan membentuk lapisan masyarakat yang semakin besar hingga menjadi negara. Pentingnya keluarga dalam

interaksi masyarakat merupakan suatu hal yang esensial. Daya tahan suatu bangsa ditentukan oleh daya tahan masyarakatnya, sementara daya tahan masyarakat ditentukan oleh daya tahan keluarga. Oleh karena itu, pembentukan serta pembinaan keluarga yang handal merupakan hal yang sangat penting (Putra & Fitri, 2021)

Organisasi masyarakat banyak yang melakukan fokus dalam pembentukan keluarga yang ideal tersebut. Pemberdayaan masyarakat tingkat keluarga merupakan upaya untuk memberdayakan individu agar mampu menjadi pribadi mandiri serta berwawasan luas. Salah satu contoh kegiatan pemberdayaan keluarga juga harus menekankan pada pemberdayaan perempuan. Salah satu kegiatan atau gerakan pemberdayaan perempuan yang berhasil dinisiasi oleh pemikiran Kartini. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan fokus pada pendidikan untuk membuka wawasan perempuan, sehingga mampu menciptakan gerakan sosial emansipasi wanita, agar mampu memperjuangkan kaum perempuan setara secara hak kepada kaum laki-laki (Hatimah & Lutfiansyah, 2022)

Organisasi sosial yang banyak berperan dalam rangka tugas pemberdayaan keluarga oleh perempuan di masyarakat dilakukan oleh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK merupakan fasilitator sekaligus mitra tidak hanya bagi pemerintah namun juga *stakeholder* lain. Organisasi ini memiliki tujuan sebagai gerakan sosial pemberdayaan di masyarakat yang berfokus pada isu perempuan dan keluarga. Selain itu PKK juga sebagai perencana, pelaksana, pengendali serta penggerak lapisan masyarakat mulai dari individu, keluarga hingga level masyarakat desa. Organisasi ini banyak berfokus dalam peningkatan kesejahteraan lahir batin untuk mewujudkan keluarga berbudaya, bahagia, mandiri serta harmonis. Selain itu, PKK juga berupaya meningkatkan pendapatan keluarga melalui pengembangan potensi pekerjaan, pembinaan, prakarsa gerakan sosial serta kegiatan sawadaya perempuan yang partisipatif (Afrizal, 2017; Daraba, 2015).

Gerakan organisasi masyarakat yang melakukan pemberdayaan masyarakat spesifik kepada keluarga tersebut merupakan peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan ekonomi. Masalah keluarga yang cukup sering dikeluhkan salah satunya adalah terkait dengan Kesehatan keluarga. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menekankan aspek kesehatan merupakan komponen penting pengukuran selain Pendidikan dan pendapatan ekonomi. Disatu sisi tingkat kesadaran keluarga maupaun masyarakat secara keseluruhan masih rendah. Problematika kesehatan yang saat ini semakin diperhatikan adalah permasalahan stunting. Permasalahan stunting yang kini semakin meningkat merupakan upaya untuk menciptakan keluarga yang kuat dan sejahtera (Pebrianti, 2022; Sibarai, 2017).

Mengatasi permasalahan stunting maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah menetapkan beberapa paket kebijakan stunting agar mampu tercipta kesediaan bahan pangan yang baik dan merata namun juga bergizi baik khususnya bagi ibu hamil dan anak kecil. Selain itu juga diatur terkait bagaimana pelaksanaan konsultasi kesehatan pra nikah serta layanan konsultasi tumbuh kembang anak secara lengkap (Andreash et al, 2022)

Jumlah stunting pada balita di Kabupaten Kotabaru sangat tinggi, sehingga dapat menyebabkan terhambatnya upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satunya di Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu desa dengan kasus stunting yang masih tinggi. Dalam upaya pencegahan stunting pada kegiatan Posyandu, Puskesmas Desa Lalapin melakukan kerjasama para kader Posyandu, ahli gizi serta bidan untuk melancarkan program tersebut. Berdasarkan data yang didapatkan dari Puskesmas Desa Lalapin, anak balita yang terdeteksi mengidap stunting ada 20 anak pada tahun 2021. Dengan adanya kasus tersebut, program stunting harus dijalankan supaya meminimalisir pertambahan jumlah kasus stunting di Desa Lalapin. Maka diperkuat pembinaan dalam pencegahan stunting yang di ikuti oleh peserta kegiatan di Desa Lalapin. Pada kegiatan Posyandu, pihak kesehatan bekerjasama dengan kader melakukan pendataan, pemeriksaan, serta memberikan bantuan gizi seimbang dan juga melakukan pencegahan hingga anak lahir dan memastikan gizi anak dengan bantuan alat untuk mengetahui tumbuh kembangnya (Fajrillah, et al 2023; Nadilla et al, 2022)

Menurut observasi awal peneliti ke puskesmas Hampang di Desa Lalapin Kabupaten pada penerapannya masih kurang, dikarenakan dalam pelaksanaan program yang belum memadai, serta masyarakat yang masih kurang menyadari akan pentingnya pencegahan stunting pada bayi dan anak balita. Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu desa dengan kasus stunting yang masih tinggi. Dalam upaya pencegahan stunting pada kegiatan Posyandu, Puskesmas Desa Lalapin melakukan kerjasama para kader Posyandu, ahli gizi serta bidan untuk melancarkan melancarkan program tersebut. Berdasarkan data yang didapatkan dari Puskesmas Desa Lalapin, anak balita yang terdeteksi mengidap stunting ada 20 anak pada tahun 2021. Dengan adanya kasus tersebut, program stunting harus dijalankan supaya meminimalisir pertambahan jumlah kasus stunting di Desa Lalapin. Maka diperkuat pembinaan dalam pencegahan stunting yang di ikuti oleh peserta kegiatan di Desa Lalapin. Pada kegiatan Posyandu, pihak kesehatan bekerjasama dengan kader melakukan pendataan, pemeriksaan, serta memberikan bantuan gizi seimbang dan juga melakukan pencegahan hingga anak lahir dan memastikan gizi anak dengan bantuan alat untuk mengetahui tumbuh kembangnya (Putri & Razak & Usman, 2023; Timisela et al, 2023).

Menurut observasi awal peneliti ke puskesmas Hampang Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Dan Keluarga Terhadap Pencegahan Stunting di Desa Lalapin Kabupaten pada penerapannya masih kurang, dikarenakan dalam pelaksanaan program yang belum memadai, serta masyarakat yang masih kurang menyadari akan pentingnya pencegahan stunting pada bayi dan anak balita. Penelitian ini secara singkat akan mendeskripsika terkait pencegahan stunting melalui Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Kotabaru secara khusus di desa Lalapin.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif serta data yang digunakan yakni data deskriptif serta berupa laporan puskesmas, artikel jurnal, dokumen pemerintah serta sumber lain yang relevan bagi peneliti untuk menunjang data yang lebih spesifik.. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan data-data fakta secara detail dan tepat tentang fenomena ataupun realita yang diteliti di lapangan, melalui observasi, data yang diperoleh, dan pengalaman, mengenai Implementasi PKK di

Desa Lalapin. Alasan peneliti mengambil metode deskriptif adalah agar penelitian lebih mudah dan luas dilakukan guna menghasilkan data yang aktual dan terbaru. Teknik pengumpulan data yakni Teknik observasi dan wawancara (*interview*) dengan beberapa informan yakni Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua PKK, Anggota Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia, Bidan Desa, Ahli Gizi, serta Ibu Penderita Stunting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan

Kepentingan Kelompok Sasaran. Berdasarkan hasil penelitian peningkatan komunikasi dan perubahan perilaku di Desa Lalapin telah dilaksanakan dengan baik misalnya kegiatan posyandu rutin setiap bulannya dan dari bidan desa juga telah memberikan penyuluhan kesehatan serta melakukan kunjungan ke setiap rumah balita yang bermasalah mengenai gizinya. Selain itu juga terdapat penyuluhan rutin setiap bulan terhadap pencegahan stunting maupun pola berperilaku hidup bersih dan sehat dan telah melakukan kunjungan ke setiap rumah yang terjaring stunting terhadap bayi dan balita gizi buruk. Selain itu, masyarakat Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru juga mengikuti pelaksanaan penyuluhan rutin terkait pencegahan stunting serta menerima kunjungan dari petugas kesehatan dan kader posyandu.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru dari kader posyandu juga telah berkontribusi terhadap penurunan angka stunting anak serta juga melakukan perubahan perilaku untuk pencegahan stunting. Kader posyandu telah meningkatkan dan membangun kepercayaan terhadap layanan Kesehatan terkait prioritas stunting dan gizi spesifik melalui ajakan kepada masyarakat untuk mengikuti posyandu rutin dan sering mengingatkan datang ke posyandu yang di jadwalkan.

Peningkatan konvergensi intervensi sensitif juga intens dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru dengan melaksanakan program PKK dan posyandu untuk pencegahan stunting yang juga melibatkan partisipasi dari kader posyandu dan dasawisma PKK desa. Selain itu, Pemerintah desa di Desa lalapin Kabupaten Kotabaru juga telah melaksanakan penyuluhan tentang pencegahan stunting serta ada himbauan dari instansi dan orang terkait dalam peningkatan khusus untuk gizi melalui pemberian makanan tambahan (PMT).

Peningkatan ketahanan gizi pada tingkat keluarga di Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru ada program kunjungan dan melakukan edukasi ke rumah balita yang terjaring stunting serta menentukan kebutuhan zat gizi pasien mulai dari bentuk hingga jumlah takaran makanan yang sesuai. Sementara, peningkatan ketahanan gizi pada tingkat masyarakat di Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru telah melakukan kegiatan penyuluhan terhadap kelompok masyarakat seperti ibu hamil dan anak balita. Terakhir, peningkatan ketahanan gizi pada tingkat masyarakat di lingkungan masyarakat Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru telah beberapa kali mengikuti penyuluhan di saat kegiatan posyandu oleh ahli gizinya secara langsung.

Tipe Manfaat. Berdasarkan hasil analisis pada penelitian di Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru menunjukkan bahwa banyaknya manfaat yang dihasilkan dengan adanya program pencegahan stunting diantaranya adalah peningkatan kunjungan dari ibu hamil serta anak-anak di posyandu, dan meningkatnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat membuktikan bahwa program tersebut memiliki manfaat yang

berdampak positif bukan hanya untuk pemerintah desa selaku pelaksana program guna menjalankan sebuah kebijakan.

Peningkatan komunikasi perubahan perilaku sudah meningkat dengan kunjungan dari ibu hamil dan balita ke posyandu, dan meningkatnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta perbaikan praktik pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita dan perubahan perbaikan makan ibu hamil agar norma masyarakat terwujud. Berdasarkan hasil riset penelitian yang dilakukan tentang peningkatan perubahan perilaku di Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru awal mula tidak mengetahui akan pentingnya perubahan perilaku untuk menghindari kasus stunting dan sudah mengetahui menjadi lebih paham dari bagaimana cara pencegahannya agar menjauhi perilaku yang tidak baik untuk kesehatan. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru telah membuka jalan pikiran akan pentingnya hidup sehat dan bersih serta motivasi untuk merubah kea rah yang positif guna membuat masyarakat lebih mengetahui terkait stunting. Pada aspek peningkatan ketahanan gizi pada tingkat keluarga telah ada peningkatan asupan gizi serta mendapatkan pengetahuan dan edukasi risiko stunting dari ahli gizi dan petugas Kesehatan. Terpenuhinya kebutuhan nutrisi gizi, terhindarnya gizi buruk dan bisa menekan angka kasus stunting serta bagaimana berperilaku hidup yang sehat dan bersih.

Derajat Perubahan yang Diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya derajat perubahan yang diharapkan telah terpenuhi dengan adanya program pencegahan stunting diantaranya adalah angka kasus stunting menurun, masyarakat sadar akan pentingnya perilaku hidup sehat dan bersih dan mampu mencegah dan menangani anak stunting dan gizi buruk serta terpenuhinya kebutuhan asupan gizi membuktikan bahwa program tersebut berhasil.

Berdasarkan hasil data penelitian yang dilakukan tentang peningkatan komunikasi perubahan perilaku untuk pengurangan kasus jumlah balita *stunting* di puskesmas Hampang dan perubahan pola pikir masyarakat terhadap *stunting* yang bisa dicegah. Peningkatan pemberdayaan masyarakat sasaran yang didapat yakni pemahaman mengenai tahapan yang dilakukan untuk mencegah stunting bagi anak serta gizi buruk juga termasuk di dalamnya. Bagi masyarakat harus peduli dengan jadwal rutin posyandu untuk bayinya agar terpenuhinya nutrisi yang seimbang.

Letak Pengambilan Keputusan. Posisi pengambilan keputusan memiliki keterkaitan erat dengan para pemangku kepentingan dimana pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan melalui serangkaian proses dimana setiap keputusan yang diambil akan melibatkan berbagai pihak dengan tujuan menyatukan berbagai pandangan guna tercapainya suatu kepentingan bersama. Posisi pengambilan keputusan dalam Program Pencegahan Stunting dapat menentukan tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut yaitu apabila kebijakan tersebut berjalan sesuai perencanaan maka dapat dikatakan berjalan dengan baik pula. Sebelum pelaksanaan program pencegahan stunting tentunya pengambilan keputusan dilakukan terlebih dahulu karena pelaksanaannya harus jelas ketentuannya mengenai pengetahuan masyarakat tentang komunikasi serta pemberdayaan yang dilakukan, misal dari tingkat individu, kelompok RT/RW, kelompok masyarakat serta pemerintah desa. Karena apabila hal-hal terkait beberapa poin yang telah disebutkan tersebut tidak jelas maka tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu permasalahan.

Berdasarkan hasil data penelitian peningkatan komunikasi perubahan perilaku terbentuknya sebuah program dengan pelibatan institusi seperti puskesmas memerlukan juga pemerintah desa agar mampu bergerak kegiatan pemberdayaan sosialnya.. Kader pembangunan manusia (PKM) Desa Lalapin Kecamatan Hampang tentang peningkatan komunikasi perubahan perilaku menyampaikan terjadi pembentukan kader untuk mendukung program pencegahan stunting sebagai perpanjangan tangan dan memberikan penyuluhan setiap bulan untuk masyarakat rentan akan kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku terbentuknya kader posyandu yang akan mendukung program pencegahan stunting untuk menyampaikan dan memberikan penyuluhan rutin setiap bulan bagi masyarakat yang kurang menerapkan pola hidup sehat dan bersih.

Peningkatan komunikasi perubahan perilaku di lingkungan masyarakat Desa Lalapin telah memberikan ASI secara berkala, mengawasi tumbuh kembang anak dan memberikan kebutuhan asupan gizi yang seimbang serta mengajarkan berperilaku hidup sehat dan bersih. Selain itu dalam aspek peningkatan konvergensi intervensi sensitif di pemerintah desa telah melaksanakan rapat bulanan kader posyandu dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan sebagai untuk mengukur kemajuan dan evaluasi program. Selain itu juga perlu dilaksanakan pengawasan program untuk menindaklanjuti pencapaian tujuan program dan perbedaan pencapaian agar dilakukan perbaikan atas evaluasi hasil tersebut.

Peningkatan konvergensi sensitif di pemerintah desa dilaksanakan dengan pemberian Tablet Tambah Darah untuk remaja wanita serta makanan tambahan dengan konsumsi protein hewani khususnya bagi anak-anak seperti contohnya ikan, susu, telur, ayam, dan daging. Selain itu, desa sudah menyediakan fasilitas seperti MCK (mandi, cuci, kakus) dan sebagian masyarakat masih belum mempunyai dan PMT (pemberian makanan tambahan) bagi status pada gizi untuk balita. Hal ini menunjukkan bahwa telah terbentuknya program yang melibatkan puskesmas dan kader posyandu serta memberikan asi secara berkala.

Pelaksanaan Program. Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa peningkatan untuk pelayanan gizi, akses kesehatan, penyediaan air minum dan sanitasi serta adanya kesadaran komitmen dari masyarakat utamanya dalam praktik pengasuhan gizi ibu dan anak. Peningkatan perubahan perilaku terdapat beberapa peningkatan seperti pelayanan gizi, akses kesehatan, penyediaan air minum dan sanitasi. Peningkatan pemberdayaan masyarakat (PMT) yakni pemberian makanan tambahan hanya dilakukan beberapa kali saja selama 1 tahun yang seharusnya dilakukan per 3 bulan 1 kali dilaksanakan dan untuk sampai saat ini tidak ada lagi. peningkatan pemberdayaan masyarakat terdapat keadaan kebiasaan buruk masyarakat dan gizi buruk pada balita yang sebagian dari masyarakat tidak menerapkan perubahan perilaku hidup sehat dan bersih mengakibatkan adanya kasus stunting. Sementara peningkatan ketahanan gizi pada tingkat di masyarakat memperoleh (PMT) pemberian makanan tambahan sebagai peningkatan status gizi anak yang seimbang.

Peningkatan perubahan perilaku di lingkungan masyarakat Desa Lalapin terdapat peningkatan adanya kasus stunting sehingga pelaksanaan program pencegahan stunting dilaksanakan. terdapat kekurangan buku Kesehatan bagi ibu hamil dan KIA (Kartu Identitas Anak) yang berarti juga dari sebagian ibu-ibu jarang untuk berkonsultasi ke posyandu. Selama ini hanya berjalan beberapa kali saja selama 1

tahun yang seharusnya 3 bulan 1 kali dilaksanakan, dan sampai sekarang tidak ada lagi dilaksanakan. Peningkatan pemberdayaan masyarakat (PMT) pemberian makanan tambahan hanya dilakukan beberapa kali saja selama 1 tahun yang seharusnya dilakukan per 3 bulan 1 kali dilaksanakan dan untuk sampai saat ini tidak ada lagi. Dalam aspek peningkatan pemberdayaan masyarakat terdapat keadaan kebiasaan buruk masyarakat dan gizi buruk pada balita yang sebagian dari masyarakat tidak menerapkan perubahan perilaku hidup sehat dan bersih mengakibatkan adanya kasus stunting.

Peningkatan Konvergensi Intervensi Sensitif Pemerintah Desa dilakukan dengan menggabungkan dana desa untuk kegiatan pencegahan stunting berupa pemberian makanan tambahan (PMT) dan susu untuk balita dan ibu hamil. Program pencegahan stunting berupa PMT (pemberian makanan tambahan) dan kebutuhan pokok yang bernutrisi untuk anak balita serta ibu hamil. Berdasarkan hasil data penelitian di atas maka dijelaskan peningkatan konvergensi intervensi sensitif di pemerintah desa untuk lingkungan masyarakat Desa Lalapin terlihat hanya beberapa dari ibu-ibu yang aktif mengikuti posyandu sebagian tidak memperdulikan, sedangkan sering dari kader posyandu dan petugas Kesehatan memberikan penyuluhan dan edukasi.

Sumber Daya yang Dilibatkan. Pada hasil penelitian pada indikator sumber daya yang dilibatkan dapat dikatakan bahwa sumber manusia (SDM) nya sudah memberikan pengaruh positif dalam pencegahan stunting dan bergerak sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku telah diberikan sebuah edukasi dan penyuluhan tentang perubahan perilaku hidup sehat dan bersih serta bekerjasama dengan kader posyandu sebagai menekan angka kasus stunting. Peran seorang suami yang wajib dalam kasus stunting ini karena bukan tugas seorang istri saja yang mendidik anak dan suami juga perlu berpartisipasi didalamnya. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku pentingnya peran seorang ayah yang dibutuhkan dalam kasus stunting karena bukan tugas seorang ibu saja mengasuh dan mendidik anak, ayah juga wajib berpartisipasi ikut andil di dalamnya.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat telah diberikan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi yang bertujuan sebagai peningkatan kesadaran dan pengetahuan ibu balita agar menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Perlu membangun komunikasi antar lintas sektor yang maksudnya antara petugas puskesmas dengan desa Lalapin. Perlu upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat telah membangun sebuah komunikasi kemitraan lintas sektoral antara petugas puskesmas dengan desa Lalapin. Peningkatan gizi masyarakat perlu juga dilakukan melalui program pemberian makanan tambahan bagi anak dan juga memantau tumbuh kembang anak. Peningkatan pemberdayaan masyarakat terdapat peningkatan dari gizi masyarakat melalui PMT (pemberian makanan tambahan), status gizi anak, dan pemantauan tumbuh kembang anak.

Program pencegahan stunting di Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru juga melibatkan SDM yang saling bekerja sama diantaranya puskesmas Kecamatan Hampang, kader posyandu dan pemerintah desa sehingga ketika berlangsungnya program tersebut memang dipegang oleh ahlinya masing-masing seperti mengajak masyarakat melakukan perilaku hidup bersih serta pemberian makanan tambahan oleh puskesmas memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi oleh kader posyandu yang lain memegang tugas lainnya untuk kelancaran program seperti menyediakan sarana dan prasarana.

Lingkungan Implementasi

Pada tahapan perancangan kebijakan yang telah dibuat mulai diterapkan pada kondisi yang berlangsung sangat menentukan keberhasilan dalam tujuan dan pencapaian melalui pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga khususnya terhadap pencegahan stunting di Kabupaten Kotabaru spesifik di desa Lalapin.

Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat. Berdasarkan hasil penelitian, indikator kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat menunjukkan bahwa kekuasaan dalam program pencegahan stunting dimiliki oleh pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Kepentingan dalam program ini berupaya meningkatkan kesadaran dalam risiko stunting serta cara pencegahannya yang tepat. Kekuasaan sangat penting agar membangun kesadaran bahaya resiko stunting dengan cara pencegahannya. Kekuasaan di lingkungan masyarakat khususnya dalam peran pemerintah desa di Desa Lalapin sangat diperlukan karena stunting dalam jangka panjang berdampak buruk. Kekuasaan di lingkungan masyarakat khususnya dalam peran pemerintah desa di Desa Lalapin sangat diperlukan karena stunting dalam jangka panjang berdampak buruk sehingga anak rentan tertular penyakit.

Strategi yang dilakukan aktor terkait memberikan sosialisasi, serta latihan dalam rangka pencegahan stunting yang benar. Pemerintah desa dan stakeholder terkait selalu aktif memberikan informasi akan bahayanya stunting jika tidak dicegah, sehingga masyarakat sudah mengetahui semua halnya untuk bisa mencegah sebelum terjadi. Strategi aktor yang terlibat telah diberikan informasi akan bahayanya stunting jika tidak segera dicegah akan menimbulkan penyebab status sosial dan ekonomi keluarga yang rendah serta sanitasi lingkungan yang kondisinya kurang baik.

Diberikan penyuluhan setiap dilakukannya posyandu anak balita yang mana akan mengundang banyak orang untuk hadir. Berdasarkan hasil data penelitian yang didapat di atas maka dijelaskan bahwa strategi aktor yang terlibat di lingkungan masyarakat Desa Lalapin memperoleh penyuluhan setiap dilaksanakannya posyandu anak balita di waktu tersebut mampu mengundang orang hadir.

Kepatuhan dan Daya Tangkap. Berdasarkan hasil penelitian implementasi pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga terhadap pencegahan stunting di Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru berdasarkan pada indikator kepatuhan menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat desa belum sepenuhnya di patuhi, hal ini dapat dilihat dari sebagian masyarakat seperti ibu hamil ,anak stunting atau status gizi buruk tidak mengikuti posyandu rutin lanjutan yang sesuai dengan jadwal. Selain itu juga masyarakat tidak mempraktikkan di kehidupan sehari-hari cuci tangan pakai sabun (CTPS) setelah berkegiatan dan sebagian wilayah RT memiliki MCK (mandi, cuci, kakus) tetapi banyak yang penyaluran langsung ke sumber air dan ada yang tidak memiliki MCK (mandi, cuci, kaku) sampai sekarang ini.

SIMPULAN

Pencegahan Stunting melalui Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru telah dilaksanakan secara baik. Beberapa indikator utama dari analisis ini yaitu: 1) Kepentingan kelompok sasaran terjadi dengan meningkatnya komunikasi, perilaku yang berubah serta

pemberdayaan masyarakat; 2) Manfaat yang dihasilkan yaitu peningkatan kunjungan posyandu oleh ibu hamil dan balita; 3) Derajat perubahan yakni terjadi penurunan signifikan dalam jumlah kasus stunting dengan kebutuhan gizi yang terpenuhi; 4) Pengambilan keputusan telah membentuk program pencegahan stunting; 5) Pelaksanaan program dengan meningkatnya pelayanan; 6) Pelibatan sumber daya dalam program terdapat pengaruh baik serta digunakan masyarakat secara langsung; 7) Kepentingan pemerintah untuk mengingatkan masyarakat bahaya stunting dan cara pencegahannya dan; 8) Strategi aktor memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan tentang dampak buruk stunting dan cara pencegahannya yang tepat. Meski demikian, kepatuhan dan pemahaman masyarakat desa belum sepenuhnya terjadi karena tidak mematuhi jadwal posyandu secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali Pers. Depok.
- Andreash, R., Sari, P.I.P., Arsayuladi, Z., Anggraini, N., Putri, D. and Purbaningrum, D.G., 2022. Edukasi Pencegahan Stunting Melalui Leaflet Kepada Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Rt 01 Rw 010 Kecamatan Cireundeu Kota Tangerang Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1).
- Chandra, B.R., Darwis, R.S. and Humaedi, S., 2021. Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Pencegahan Stunting. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), pp.107-123.
- Daraba, D. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, *Sosiohumaniora*, 17 (2), 168-171.
- Fajrillah, A.A.N., Fauzi, R., Alam, E.N. and Dewi, F., 2023. Pengembangan Platform Edukasi dan Kolaborasi Sebagai Salah Satu Upaya Penurunan Angka Stunting Kota Bandung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(5), pp.621-628.
- Hatimah, I. and Lutfiansyah, D.Y., 2022. Pendampingan Keluarga Melalui Program Parenting Untuk Menekan Angka Stunting Di Kabupaten Cirebon. *E-Coops-Day*, 3(1), pp.123-132.
- Nadilla, H.F., Nurwati, N. and Santoso, M.B., 2022. Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Anak Stunting Pada Keluarga Penerima Manfaat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), pp.17-26.
- Pebrianti. N. 2022. Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Ejournal sosiatri* 8(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting

Putra, A. and Fitri, Y., 2021. Studi Meta Analisis: Efektifitas Pencegahan Stunting Melalui Program Literasi Gizi Menggunakan Pendekatan Pendidikan Keluarga. *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah*, 4(1), pp.1-10.

Putri, M.A., Razak, A.R. and Usman, J., 2023. Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dalam Upaya Penanganan Stunting Pada Masa Pandemi Covid-19. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(1), pp.139-151.

Sibarai. ARM. 2017, "Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Retok Kecamatan Retok. *PubliKA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 6(1).

Subarsono, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Bandung*: Refika Aditama

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang)*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya,

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/227/KUM/2021 Tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 Di Kabupaten Kotabaru

Timisela, N.R., Leatemia, E.D., Polnaya, F.J., Kembauw, E., Mailoa, M., Nurjannah, N., Matulesy, M., Latuconsina, H., Tuharea, R., Fitriani, I. and Ayhuan, S.A., 2023. Implementasi Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting. *Nusantara. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), pp.572-576.

PROFIL SINGKAT

Drs. Saifudin, M.Hum merupakan dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat sejak 1989. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat pada 1988. Kemudian melanjutkan Pendidikan magister ilmu hukum di Universitas Hasanudin, Makassar pada tahun 1994. Di FISIP ULM mengampu mata kuliah berikut yakni Studi Konstitusi, Hukum Pemerintahan, Politik Hukum & Agraria, Pengantar Ilmu Hukum, Proses Legislasi, Lembaga Kepresidenan, Proses dan Teknik Perundang-undangan, Hubungan Pusat & Daerah dan Sistem Pemerintahan Desa.